

Risalah**– RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU)-----**

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2026

Pukul : 10.00 s/d 12.45 WIB

Tempat : Lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh

Pimpinan Rapat : Irwansyah, ST (Ketua)

Anggota yang Hadir : Syarifah Munirah, S. Ag; T. Iqbal Djohan, SE; M. Iqbal, ST; Faisal Ridha, ST

Turut Hadir : LSM GERAK Aceh; Baznas Aceh; Saka; Ketua Balai Inong; PKBI; Beutala; YRBI; CYDC; Pedasang; Balai Syura; Maha; Jeumpa Puteh; Balai Inong Tgk. Chik L; Balai Inong Raudhatannisa; Balai Syura Banda Aceh; Balai Inong Putroe Bungsu; Balai Inong Cut Mutia; Balai Inong Mufakat; Para Legal LBH; Kamu Dampres; SP Aceh; Mafindo Aceh; AWPf; YKMI; Posbakum; Baznas Microfinance Desa Aceh; Balee Inong; KPI Aceh; CDC; Balai Inong Gemilang; BMB; Balai Inong Kartini; Aliansi Inong Aceh; Nalai Inong Munawarah; Bentala Aceh; Mahasiswa dan Masyarakat Kota Banda Aceh.

ACARA

**Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) “SUARA WARGA”
dengan TEMA: *MENDENGAR SUARA, MEMBANGUN KOTA,
DENGAN KOLABORASI WARGA.***

KESIMPULAN

- Rapat membahas pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun Kota Banda Aceh, dengan penekanan pada komunikasi terbuka melalui media sosial dan musyawarah. Para anggota DPRK menyoroti peran mereka sebagai jembatan antara warga dan eksekutif, serta

C

C

keterbatasan wewenang dalam eksekusi kebijakan. Isu layanan publik, seperti peningkatan pengaduan layanan emosi dan insiden yang tidak terprediksi, menjadi perhatian utama. Diskusi juga menyoroti perlunya verifikasi informasi di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman publik.

- RDPU menghadirkan beragam aktor: CSO, komunitas anak muda, lansia, disabilitas, UMKM dan kelompok rentan—tujuan utama mendengar suara warga dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan.
- Diskusi terfokus pada empat isu utama:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan & kebersihan;
 3. Pemberdayaan ekonomi perempuan/UMKM; dan
 4. Kesiapsiagaan bencana.
- Pada Hal Kesehatan ada beberapa yang perlu Diperhatikan, yaitu :
 - a. Pelayanan - Dimana Pelayanan Masih Kurang.
 - b. Kurangnya sosialisasi Kesehatan - Dimana Alur pelayanan dan kebijakan tidak tersosialisasi ke masyarakat sehingga muncul persepsi bahwa petugas "tidak maksimal".
 - c. Kualitas komunikasi petugas berpengaruh pada kesediaan masyarakat mengakses layanan.
 - d. Kesadaran masyarakat masih rendah terkait kebersihan lingkungan; sampah dan kebersihan berdampak langsung pada kesehatan.
- Yang perlu diperhatikan pada bidang pendidikan adalah:
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana serta kualitas guru yang belum maksimal.
 - b. Kota tidak ramah terhadap disabilitas.
 - c. Isu zonasi sekolah tidak berjalan optimal sehingga akses anak ke sekolah setempat terganggu dan mempengaruhi inklusi.
 - d. Kesejahteraan guru masih kurang, terlebih pada guru paud dan belum sejahtera.
 - e. Kurangnya pengawasan terkait izin dari pembukaan day care.



- Pemberdayaan ekonomi perempuan & UMKM, adanya Keterbatasan akses pembiayaan dan modal, jebakan pinjaman yang memberatkan pelaku UMKM, Minimnya kapasitas teknis/kapasitas usaha untuk bersaing dan memanfaatkan peluang pasar, Maraknya perjudian/aktivitas online yang menggerus ekonomi rumah tangga, Data dan dukungan pasar kurang tersedia; usulan promosi produk lokal melalui event/expo dan platform dipromosikan.
- Kendala terhadap perekonomian adalah minimnya lapangan kerja, maraknya judi online, maraknya sistem rintenir dan akses pemodalan yang sulit.
- Penanggulangan bencana berkelanjutan. Ada 20 desa untuk penanggulangan bencana yang masih kurang aktif dan belum maksimalnya pengelolaan pembuangan sampah dikota Banda Aceh.

Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) :

1. DPRK berkomitmen membuka diri untuk terus memantau dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui media sosial secara aktif.
2. Ketimpangan distribusi sumber daya (mis. program BOS/BOSKA) menimbulkan perbedaan fasilitas antar-sekolah; beberapa sekolah mendapat dukungan besar sementara sekolah lain kurang.
3. Kebutuhan khusus: inklusi untuk anak disabilitas, akses SLB, transportasi sekolah, dan sertifikasi kualitas tenaga pendidik menjadi perhatian.
4. Data penerima bantuan/kartu (DTSEN) belum akurat / belum selaras; perlu sinkronisasi data dan sosialisasi.
5. Perlunya standarisasi alur layanan kesehatan, peningkatan kapasitas petugas, dan kampanye kebersihan terpadu
6. DPRK akan menindaklanjuti pengaduan dengan menghubungi pihak terkait dan memastikan penyelesaian.
7. Pentingnya kontribusi semua pihak dalam membangun kota secara kolaboratif.

1

1

8. Menyepakati untuk kegiatan RDPU atau forum akan dilakukan secara rutin per Tiga bulanan.
9. Berharap kualitas Pendidikan harus merata, baik pada sekolah dasar maupun menengah.
10. Adanya pemerataan pembagian dana BOS agar sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan DPRK akan mengawasi pembagiannya.
11. Untuk permasalahan sampah memang sulit, krn ini harus diselesaikan di hulunya,
12. Berharap adanya pembagian bak sampah sesuai keperluannya.
13. DPRK juga berupaya untuk melakukan pengelolaan dan pengecekan terhadap saluran drainase di Kota Banda Aceh.
14. DPRK menyepakati untuk mendesak Gubernur Aceh untuk membatalkan pergub terkait JKA.
15. DPRK menyepakati adanya tempat khusus untuk penjualan makanan di bulan puasa bagi warga non islam.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH**

Ketua,

IRWAN SYAH, ST

1

2